

MAKNA PENGENDALIAN KEUANGAN TANPA SAK ETAP PADA USAHA JASA PHOTOCOPY AREA GRESIK KOTA BARU

Rizka Octavia Hariyati¹, Rahmat Agus Santoso²

^{1,2}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Jawa Timur, Indonesia

rizka.oh@gmail.com¹, ra_santoso@umg.ac.id²

Abstract

Background - Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have an important role in the economy of a region, especially in Indonesia. Photocopy service businesses that carry out financial records using simple bookkeeping without using SAK ETAP and financial control systems, but their business continues to increase as seen from the remaining balance.

Objective - This study aims to analyze the meaning of financial control without using SAK ETAP in photocopying service businesses in Gresik Kota Baru.

Design/Methodology/Approach - The research approach is descriptive qualitative. Data collection techniques using the method of documentation and interviews with the selection of informants using purposive sampling technique. The data analysis technique uses an interactive model.

Findings - The results of this study indicate that the meaning of financial control according to the photocopy service business owner is to spend income or income received and meet consumer needs, and regulate expenditure so that it is not more than the income received. In carrying out financial control, there are how to control activities, constraints, and impacts if you do not carry out financial control.

Research implications - This research can provide information as input for business owners in policy making in order to improve performance in presenting financial statements in accordance with financial accounting standards and using management control systems, especially financial control.

Research limitations - This study only examines the meaning of financial control from aspects of financial accounting standards and from financial reports so that the results obtained are less broad.

Keywords: MSMEs, Financial Registration, SAK ETAP, Financial Control

Abstrak

Latar Belakang - Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu daerah terutama di Indonesia. Usaha jasa photocopy yang melakukan pencatatan keuangan menggunakan pembukuan sederhana tanpa menggunakan SAK ETAP dan sistem pengendalian keuangan, namun usahanya terus meningkat dilihat dari sisa saldo.

Tujuan - Penelitian ini bertujuan melakukan analisis tentang makna pengendalian keuangan tanpa menggunakan SAK ETAP pada usaha jasa photocopy di Gresik Kota Baru.

Desain / metodologi / pendekatan - Pendekatan penelitian yaitu kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara dengan pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan model interaktif.

Temuan - Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna pengendalian keuangan menurut pemilik usaha jasa photocopy yaitu membelanjakan penghasilan atau pendapatan yang diterima

74

<http://dx.doi.org/10.30587/mahasiswamanajemen.v3i01.1854>

dan memenuhi kebutuhan konsumen, serta mengatur pengeluaran agar tidak lebih dari pendapatan yang diterima. Dalam melakukan pengendalian keuangan terdapat bagaimana aktivitas pengendalian, kendala, dan dampak apabila tidak melakukan pengendalian keuangan.

Implikasi penelitian - Penelitian ini dapat memberikan informasi sebagai bahan masukan pemilik usaha dalam pengambilan kebijakan guna meningkatkan kinerja dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan menggunakan sistem pengendalian manajemen terutama pengendalian keuangan.

Batasan penelitian - Penelitian ini hanya mengkaji tentang makna pengendalian keuangan dari aspek standar akuntansi keuangannya maupun dari laporan keuangannya sehingga hasil yang diperoleh kurang luas.

Kata kunci: UMKM, Pencatatan Keuangan, SAK ETAP, Pengendalian Keuangan

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu daerah terutama di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM dapat meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil dan juga mampu membantu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena sektor ini menyerap banyak tenaga kerja. Jumlah UMKM di Indonesia yang semakin meningkat, maka semakin banyak pula penciptaan peluang lapangan kerja bagi para pengangguran.

Kabupaten Gresik selain terkenal sebagai kota industri, juga menyimpan potensi UMKM yang seharusnya menjadi perhatian lebih bagi pemerintah daerah. Keberadaan UMKM harus bisa dipertahankan dan dikembangkan agar dapat terus berperan dalam meningkatkan perekonomian daerah. UMKM telah memberikan dampak positif terhadap permasalahan jumlah pengangguran, jumlah kemiskinan, dan pemerataan dalam pendapatan dan pembangunan ekonomi negara.

Industri di Kabupaten Gresik tidak hanya bergerak dibidang perdagangan saja, melainkan banyak juga yang bergerak di industri jasa. Wilayah Gresik Kota Baru (GKB) yang dikembangkan oleh PT BLP Property (Bumi Lingga Pertiwi) ini merupakan kawasan paling potensial di Kabupaten Gresik. Masyarakat banyak yang telah mengembangkan usahanya di wilayah GKB, baik usaha dagang maupun usaha jasa. GKB juga terdapat banyak tempat pendidikan mulai dari Sekolah Dasar, Lembaga Bimbingan Belajar hingga Universitas. Banyaknya instansi tersebut menyebabkan timbulnya kebutuhan akan jasa *photocopy* untuk menggandakan berkas-berkas.

Usaha jasa *photocopy* menjadi berkembang di area GKB untuk melayani kebutuhan masyarakat diantaranya Ireng Poteh, RJM Fotocopy Gresik, dan Gresik

Setting. Pada umumnya mereka menyediakan jasa percetakan print dan *photocopy*. Salah satu tolak ukur kesuksesan UMKM, baik usaha dagang maupun usaha jasa terutama usaha jasa *photocopy* adalah kondisi keuangannya. Menganalisis laporan keuangan berarti menggali lebih banyak informasi yang tertulis dalam laporan keuangan yang dibuat oleh suatu usaha. Jika informasi ini disajikan dengan tepat, maka informasi tersebut sangat berguna dalam mengambil keputusan.

Kendala yang dialami oleh pelaku UMKM dalam pengelolaan seringkali disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman dalam bidang keuangan. Biasanya pencatatan keuangan yang dilakukan beberapa UMKM hanya dengan cara sederhana dan kurang lengkap (Krisdiartiwi, 2011). Ikatan Akuntansi Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tanggal 17 Juli 2009 dan berlaku efektif 1 Januari 2011. Diterbitkannya SAK ETAP bertujuan untuk mengimplementasikan penyusunan laporan keuangan pada entitas tanpa akuntabilitas publik.

UMKM termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik karena UMKM pada umumnya belum memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (IAI, 2009). Kehadiran SAK ETAP diharapkan mampu memberikan kemudahan untuk UMKM dalam menyajikan laporan keuangan. SAK ETAP juga diharapkan mampu menjadi solusi permasalahan internal organisasi bisnis, terutama bagi manajemen yang hanya melihat hasil laba yang diperoleh tanpa melihat kondisi keuangan yang sebenarnya.

Dalam menjalankan usahanya, baik Ireng Poteh, RJM Fotocopy Gresik, dan Gresik Setting melakukan pencatatan keuangan dengan pembukuan sederhana seperti data pendapatan dan pengeluaran. Format laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada ketiga usaha jasa *photocopy* tersebut, format laporan keuangan yang digunakan tidak mengikuti SAK ETAP sehingga kurang efektif dalam melakukan pengendalian keuangan.

Berdasarkan wawancara pra-penelitian dengan pemilik usaha jasa *photocopy* Ireng Poteh yaitu Bapak Antoni mengatakan bahwa pihaknya ingin melakukan pencatatan keuangan berdasarkan standar akuntansi, namun pemilik usaha belum memiliki ilmu akuntansi dan merasa kesulitan dalam melakukan pencatatan keuangan

berdasarkan standar akuntansi. Hal serupa juga diungkapkan oleh pemilik usaha jasa *photocopy* RJM Fotocopy Gresik yaitu Bapak Rudianto dan pemilik usaha jasa *photocopy* Gresik Setting yaitu Ibu Yulia Nurshanti yang mengatakan bahwa untuk melakukan pencatatan keuangan, dengan mengetahui pengeluaran dan pendapatan yang diperoleh saja sudah cukup.

Pencatatan keuangan pada usaha jasa *photocopy* memang belum menggunakan SAK ETAP, namun jika dilihat dari sisa saldo yang tertera pada laporan sederhana dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan. Sisa saldo tersebut mengindikasikan adanya kenaikan kekayaan atau adanya laba yang diperoleh ketiga usaha jasa *photocopy* tersebut. Sistem pengendalian keuangan tetap diperlukan untuk mengoptimalkan laba yang diperoleh. Menurut Suadi (2011), sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang terdiri dari beberapa anak sistem yang saling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mencapai tujuan perusahaan melalui strategi yang efektif dan efisien.

Menurut Harsanti (2010), fokus utama dalam pengendalian keuangan adalah suatu inisiatif yang dipilih dan yang akan mengubah kemungkinan serta pencapaian hasil yang diharapkan. Sistem pengendalian manajemen jika dikaitkan dengan fungsi akuntansi yaitu dapat menerapkan secara praktis prinsip-prinsip dan praktik akuntansi yang sehat dalam organisasi bisnisnya serta dapat mengembangkan dan memelihara catatan-catatan termasuk pengendalian internal yang memadai sehingga laporan mencerminkan secara wajar kondisi keuangan dan hasil usaha dari organisasi bisnis (Hery, 2013).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cahyani (2014) menyatakan bahwa adanya sistem pengendalian internal kas bisa menaikkan pendapatan dan biaya besar, kenaikan SHU, peningkatan modal sendiri dengan peningkatan anggota, mengalokasikan investasi untuk pembukuan kantor cabang dan meningkatkan kesejahteraan pengurus, pengawas dan pengelolaan serta anggota. Apabila dikaitkan dengan usaha jasa *photocopy*, dengan penerapan sistem pengendalian internal keuangan, maka semakin teratur pengelolaan kekayaan dan pemilik usaha jasa dapat menerapkan pencatatan keuangan sesuai SAK ETAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan pemilik usaha dalam melakukan pengendalian keuangan dan apa

makna pengendalian keuangan menurut pemilik usaha jasa *photocopy* sehingga sisa saldo dapat meningkat dan kekayaan pemilik usaha jasa juga meningkat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut Badan Pusat Statistik, usaha mikro, kecil dan menengah dinilai berdasarkan jumlah tenaga kerjanya. Usaha kecil memiliki entitas tenaga kerja berjumlah 5-19 orang, sedangkan pada usaha menengah memiliki entitas tenaga kerja berjumlah 20-99 orang.

Definisi Laporan Keuangan

Menurut Kieso (2016), laporan keuangan merupakan sarana komunikasi dalam menyampaikan informasi mengenai keuangan terutama kepada pihak eksternal perusahaan. Tujuan laporan keuangan salah satunya adalah menyediakan informasi kinerja keuangan, posisi keuangan, serta laporan arus kas suatu organisasi bisnis yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Menurut IAI (2009), Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik umumnya digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas atau organisasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, lembaga pemeringkat kredit, dan kreditur.

Pengertian Sistem Pengendalian Manajemen

Menurut Suadi (2011), sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang terdiri dari beberapa anak sistem yang saling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar orang lain tersebut mau

mencapai tujuan organisasi bisnis melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien.

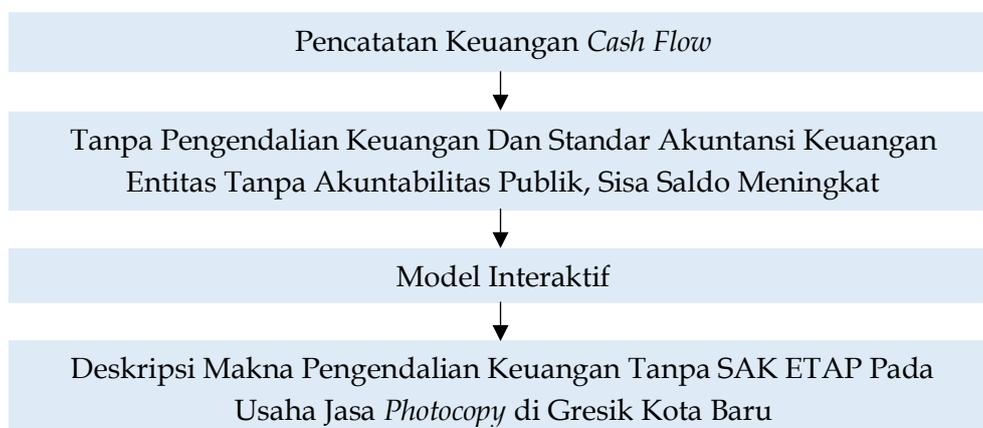
Komponen-Komponen Sistem Pengendalian Manajemen

Menurut Sujarweni (2015) sistem pengendalian manajemen memiliki 5 (lima) komponen utama sebagai berikut.

1. Lingkungan Pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan sarana dan prasarana yang ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk menjalankan struktur pengendalian manajemen yang baik.
2. Penaksiran Risiko. Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan.
3. Aktivitas Pengendalian. Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan.
4. Informasi dan Komunikasi, yang dalam hal ini merancang sistem informasi perusahaan dan manajemen puncak harus mengetahui segala informasi yang ada dalam perusahaan.
5. Pemantauan adalah kegiatan untuk mengikuti jalannya sistem informasi akuntansi, sehingga apabila ada sesuatu berjalan tidak seperti yang diharapkan, dapat segera diambil tindakan.

Kerangka Berpikir

Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh usaha jasa *photocopy* di Gresik Kota Baru, berikut adalah gambaran alur pikirnya.



Gambar 1: Kerangka Pikir

III. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka. Penelitian ini dikatakan deskriptif, karena tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diamati. Sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, jenis penelitian ini sangat tepat karena peneliti akan mendeskripsikan data bukan untuk mengukur data yang diperoleh.

Lokasi Penelitian

Gresik Kota Baru yang terdiri dari tiga usaha jasa *photocopy*, yaitu *photocopy* Ireng Poteh, *photocopy* RJM Fotocopy Gresik, dan *photocopy* Gresik Setting.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari interview (wawancara) kepada narasumber yang mengetahui informasi daripada objek penelitian dan observasi untuk memperoleh hasil pengamatan tentang situasi dan kondisi objek penelitian. Data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini (Sugiyono, 2016).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian ini yaitu dengan metode dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan membandingkan bentuk Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dari Ikatan Akuntan Indonesia dengan laporan keuangan atau pembukuan sederhana berupa *cashflow* milik usaha jasa *photocopy* di Gresik Kota Baru. Teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur.

Unit Analisis dan Informan

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah usaha jasa *photocopy* di Gresik Kota Baru yang melakukan pencatatan keuangan tanpa Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan memahami makna pengendalian keuangan. Informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah pemilik usaha jasa *photocopy* yang berada di area Gresik Kota Baru, dengan kriteria memiliki laporan keuangan atau pencatatan keuangan, memiliki tenaga kerja atau karyawan, dan lama berdirinya usaha jasa tersebut.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Serta teknik keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi teknik dan *member check*.

IV. HASIL PENELITIAN DAN INTERPRETASI

Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gresik Kota Baru yang terdiri dari tiga usaha jasa *photocopy*, yaitu *photocopy* Ireng Poteh, *photocopy* RJM Fotocopy Gresik, dan *photocopy* Gresik Setting. Usaha jasa *Photocopy* Ireng Poteh didirikan tahun 2012 oleh Bapak Antoni. Lokasi pusat atau induk *Photocopy* Ireng Poteh beralamat di Jl. Arief Rahman Hakim No. 103, Pekauman, Gresik. Memiliki dua cabang di Jl. Belitung I No. 03, GKB, Gresik, dan Jl. Arief Rahman Hakim No. 122, Pekauman, Gresik. Usaha jasa *Photocopy* RJM Fotocopy Gresik didirikan sejak tahun 2014 oleh Bapak Rudianto. Lokasi di Jl. Palangkaraya 1 No. 53, GKB, Gresik. Usaha jasa *photocopy* Gresik Setting didirikan sejak tahun 2007 oleh Ibu Yulia Nurshanti. Alamat usaha jasa *photocopy* Gresik Setting ini berada di Jl. Kalimantan No. 151 GKB, Gresik.

Analisis Data

Dalam proses menerapkan pengendalian keuangan, pemilik usaha jasa *photocopy* melakukan aktivitas pengendalian keuangan seperti pembelian persediaan barang secara partai atau *kulakan*. Setiap persediaan barangnya sisa sedikit ataupun habis, pemilik usaha jasa *photocopy* selalu berusaha memenuhi persediaan barangnya dengan melakukan pencatatan dan pengecekan setiap minggu atau setiap bulan.

Kendala yang dihadapi oleh pemilik usaha jasa *photocopy* pada saat melakukan pengendalian keuangan yaitu apabila pada saat melakukan *kulakan* barang yang akan dibeli tidak terdapat di distributornya, dan kendala lain yang dihadapi pemilik usaha jasa *photocopy* yaitu ketika pemilik usaha jasa *photocopy* membutuhkan barang yang persediaannya cepat habis, sedangkan pendapatan usahanya tidak mencukupi untuk melakukan pembelian barang, otomatis pemilik usaha jasa *photocopy* harus mengeluarkan uang pribadinya dulu untuk membayar *kulakan* tersebut.

Pemilik usaha jasa *photocopy* mengungkapkan bahwa terdapat dampak jika tidak menerapkan pengendalian keuangan, yaitu akan terjadinya kerancuan dalam pencatatan keuangan dan keuangan jadi tidak terkontrol atau tidak terkendali. Sehingga pemilik usaha jasa *photocopy* memaknai pengendalian keuangan yaitu membelanjakan penghasilan atau pendapatan yang diterima serta memenuhi kebutuhan konsumen dengan melakukan pembelian persediaan barang dari distributor yang kemudian akan dijual kembali dengan menyesuaikan kemampuan konsumen dalam membeli barang atau jasa, dan yang terutama dapat mengatur pengeluaran yang dilakukan agar tidak lebih dari pendapatan yang diterima.

Dalam menerapkan pengendalian keuangan, meskipun tanpa pencatatan keuangan yang sesuai standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, pemilik usaha jasa *photocopy* tetap dapat menjalankan usahanya karena mereka memiliki cara tersendiri dalam melakukan pengendalian keuangan tanpa pencatatan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Walaupun memiliki banyak kendala, hal itu tidak meruntuhkan jiwa usaha pemilik usaha jasa *photocopy* dalam menjalankan usahanya, sehingga usaha yang dijalankan masih tetap ada dan semakin bertambah kekayaannya.

Pengendalian keuangan tanpa standar akuntansi keuangan maknanya adalah pengendalian yang tidak bergantung aturan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan, sehingga usaha tetap dapat berjalan karena tidak ada aturan rumit yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, mengingat pelaku usaha kurang memahami isi dari laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.

Interpretasi Hasil

Menurut teori mengenai pengendalian keuangan, makna pengendalian keuangan yaitu pengendalian yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut keuangan, tentang

pemasukan dan pengeluaran, biaya-biaya perusahaan termasuk pengendalian anggarannya (Hasibuan, 2017).

Hasil penelitian kualitatif mengenai makna pengendalian keuangan menurut pemilik usaha jasa *photocopy* yaitu membelanjakan penghasilan atau pendapatan yang diterima serta memenuhi kebutuhan konsumen dengan melakukan pembelian persediaan barang dari distributor yang kemudian akan dijual kembali dengan menyesuaikan kemampuan konsumen dalam membeli barang atau jasa, dan yang terutama dapat mengatur pengeluaran yang dilakukan agar tidak lebih dari pendapatan yang diterima. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, makna pengendalian keuangan tidak hanya mengenai pemasukan dan pengeluaran pada perusahaan saja seperti dalam teori, namun juga terkait dengan kebutuhan konsumen dan persediaan barang.

Menurut Mulyadi (2017), untuk melakukan aktivitas pengendalian keuangan di dalam perusahaan tergantung besar kecilnya perusahaan tersebut, dan telah berkembang menjadi lima tahapan yaitu pengendalian keuangan dengan menggunakan akuntansi historis, pengendalian keuangan dengan menggunakan anggaran statis dan biaya standar, pengendalian keuangan dengan menggunakan anggaran fleksibel dengan biaya standar, pengendalian keuangan dengan pembuatan pusat pertanggungjawaban, dan penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban.

Dalam proses menerapkan pengendalian keuangan, pemilik usaha jasa *photocopy* melakukan aktivitas pengendalian keuangan seperti pembelian persediaan barang secara partai atau *kulakan*. Setiap persediaan barangnya sisa sedikit ataupun habis, pemilik usaha jasa *photocopy* selalu berusaha memenuhi persediaan barangnya dengan melakukan pencatatan dan pengecekan setiap minggu atau setiap bulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, aktivitas pengendalian keuangan yang dilakukan pemilik usaha jasa *photocopy* yaitu melakukan pengecekan seperti memenuhi persediaan barang dan melakukan pencatatan setiap minggu atau setiap bulan. Berbeda dengan berdasarkan teori, di mana aktivitas pengendalian keuangan yang dilakukan rata-rata melakukan pengendalian keuangan dengan anggaran, biaya, dan sistem akuntansi.

Menurut teori pengendalian keuangan, *permasalahan yang timbul dalam implementasi struktur sistem pengendalian manajemen yang dapat diidentifikasi sekarang ini adalah terletak pada kelemahan struktur dan kelemahan proses. Sistem pengendalian manajemen*

tidak dapat mewujudkan tujuan sistem kemungkinan karena strukturnya tidak pas dengan lingkungan yang dihadapi perusahaan, dapat juga terjadi tujuan sistem pengendalian manajemen tidak tercapai karena proses sistem pengendalian manajemennya lemah (Halim, 2009).

Kendala yang dihadapi oleh pemilik usaha jasa *photocopy* pada saat melakukan pengendalian keuangan yaitu apabila pada saat melakukan *kulakan* barang yang akan dibeli tidak terdapat di distributornya, dan kendala lain yang dihadapi pemilik usaha jasa *photocopy* yaitu ketika pemilik usaha jasa *photocopy* membutuhkan barang yang persediaannya cepat habis, sedangkan pendapatan usahanya tidak mencukupi untuk melakukan pembelian barang, otomatis pemilik usaha jasa *photocopy* harus mengeluarkan uang pribadinya dulu untuk membayar *kulakan* tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kendala atau permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai persediaan barang dan mengenai keuangan yang dikelola, berbeda dengan berdasarkan teori yang menyatakan bahwa permasalahan dalam pengendalian yaitu terletak pada struktur dan proses.

Menurut Choi (2010), dampak yang timbul dikarenakan perusahaan tidak memberlakukan struktur sistem pengendalian manajemen antara lain organisasi perusahaan akan kesulitan menghadapi berbagai perubahan tajam radikal, konstan, pesat, serentak, sehingga roda organisasi tidak akan jalan dan tidak dapat membuat berbagai perencanaan, tidak dapat memprediksi target organisasi ke depannya. Pemilik usaha jasa *photocopy* mengungkapkan bahwa terdapat dampak jika tidak menerapkan pengendalian keuangan, yaitu akan terjadinya kerancuan dalam pencatatan keuangan dan keuangan jadi tidak terkontrol atau tidak terkendali.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dampak tidak menerapkan pengendalian keuangan yaitu terjadinya kerancuan dalam pencatatan keuangan, Berbeda dengan berdasarkan teori, di mana dampak perusahaan yang tidak memberlakukan pengendalian, organisasi tidak akan jalan dan tidak dapat membuat berbagai perencanaan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah mengenai penelitian yang dilakukan pada usaha jasa *photocopy* di Area Gresik Kota Baru dengan menggunakan berbagai macam metode atau teknik yang digunakan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pemilik usaha jasa *photocopy* memaknai pengendalian keuangan yaitu membelanjakan penghasilan atau pendapatan yang diterima serta memenuhi kebutuhan konsumen dengan melakukan pembelian persediaan barang dari distributor yang kemudian akan dijual kembali dengan menyesuaikan kemampuan konsumen dalam membeli barang atau jasa, dan yang terutama dapat mengatur pengeluaran yang dilakukan agar tidak lebih dari pendapatan yang diterima.
2. Dalam proses menerapkan pengendalian keuangan, pemilik usaha jasa *photocopy* melakukan aktivitas pengendalian keuangan seperti pembelian persediaan barang secara partai atau *kulakan*. Setiap persediaan barangnya sisa sedikit ataupun habis, pemilik usaha jasa *photocopy* selalu berusaha memenuhi persediaan barangnya dengan melakukan pencatatan dan pengecekan setiap minggu atau setiap bulan.
3. Kendala yang dihadapi oleh pemilik usaha jasa *photocopy* saat melakukan pengendalian keuangan yaitu apabila melakukan *kulakan* barang yang akan dibeli tidak terdapat di distributornya, dan kendala lain yang dihadapi pemilik usaha jasa *photocopy* yaitu ketika pemilik usaha jasa *photocopy* membutuhkan barang yang persediaannya cepat habis, sedangkan pendapatan usahanya tidak mencukupi untuk melakukan pembelian barang, otomatis pemilik usaha jasa *photocopy* harus mengeluarkan uang pribadinya dulu untuk membayar *kulakan* tersebut.
4. Pemilik usaha jasa *photocopy* mengungkapkan bahwa terdapat dampak jika tidak menerapkan pengendalian keuangan, yaitu akan terjadinya kerancuan dalam pencatatan keuangan dan keuangan jadi tidak terkontrol atau tidak terkendali.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, Afifah Fajar. 2014. *Sistem Pengendalian Internal Kas Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Wa Tamwil Sejahtera Sleman*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
- Choi, Frederick D. S, Meek, Gary K, dan Hamdan, M. Yusuf. 2010. *Akuntansi Internasional. Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Donald, E. Kieso, J. J. 2016. *Intermediate Accounting 13th Ed*. America: John Willey and Sons, Inc.

- Halim, Abdul, Achmad Tjahjono, dan Muh. Fakhri Husein. 2009. *Sistem Pengendalian Manajemen Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Harsanti, Ponny, Dwi Sudaryati, dan Nora Hilmi. 2010. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus*. Jurnal Akuntansi.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hery. 2013. *Dasar Akuntansi*. Jakarta: Media Kom.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Krisdiartiwi. 2011. *Pembukuan Sederhana untuk UMKM*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Mulyadi. 2017. *Sistem Akuntansi Edisi Empat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suadi, Arif. 2011. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.